

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif, salah satunya dikenal dengan istilah Good Governance, harus diterapkan dalam sebuah pemerintahan atau negara. Tata Kelola yang Baik merujuk pada penerapan manajemen pembangunan yang solid dan akuntabel, yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi serta efisiensi pasar. Konsep ini mencakup berbagai aspek, seperti penghindaran dari alokasi investasi yang tidak tepat serta upaya pencegahan terhadap praktik korupsi dalam konteks politik dan administrasi. Selain itu, tata kelola yang baik juga mencakup penerapan disiplin anggaran yang ketat dan pembentukan kerangka hukum serta politik yang mendukung pertumbuhan sektor usaha (Prokomsetda, 2017).

Peran serta masyarakat memiliki signifikansi yang mendalam dalam implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif. Setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui partisipasi langsung maupun melalui perwakilan yang sah yang mengakomodasi kepentingan mereka. Partisipasi ini berlandaskan pada kebebasan untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat, serta kemampuan untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif dan produktif, bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi dapat mencerminkan aspirasi kolektif masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari partisipasi ini adalah perencanaan partisipatif, yang meliputi proses penyusunan agenda pembangunan, serta pengawasan, evaluasi, dan monitoring yang melibatkan partisipasi aktif, bersama dengan mekanisme konsultatif yang dirancang untuk menangani berbagai isu sektoral (Prokomsetda, 2017).

Tugas utama Pemerintah Kabupaten meliputi berbagai aspek pelayanan dasar yang esensial, termasuk sektor pendidikan, kesehatan,

serta penyediaan prasarana lingkungan yang mencakup fasilitas umum. Fasilitas umum tersebut terdiri dari elemen-elemen seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Infrastruktur ini memainkan peranan yang krusial dalam sistem perekonomian. Peningkatan kondisi infrastruktur di suatu daerah dapat menghasilkan dampak yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi di wilayah tersebut (Retno Wulan Sekarsari,2018).

Prasarana jalan di Indonesia memainkan peranan yang sangat krusial dalam keseluruhan sistem transportasi nasional, yang mencakup berbagai moda seperti transportasi udara, laut, kereta api, dan jalan raya. Di antara berbagai moda transportasi tersebut, jalan raya menyokong sekitar 92% dari total angkutan penumpang dan 90% dari angkutan barang. Saat ini, nilai kapitalis dari aset prasarana jalan nasional telah melampaui angka dua ratus triliun rupiah, menunjukkan betapa strategisnya peran prasarana jalan dalam mengurangi biaya transportasi. Dengan terus berkembangnya prasarana jalan yang semakin andal, hal ini dapat menjadi faktor signifikan dalam mendorong pembangunan ekonomi. Selain hal tersebut, peningkatan mutu infrastruktur jalan juga akan mengerek daya saing ekonomi lokal, ekonomi negara, dan memperkokoh kedudukan ekonomi nasional dalam persaingan global (Paulus Iriyena, Dkk, 2019)

Prasarana jalan memainkan peran krusial dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pengaruh positif dari fenomena ini dapat diamati melalui beberapa indikator, termasuk peningkatan nilai konsumsi, kenaikan produktivitas tenaga kerja, serta perbaikan akses ke kesempatan kerja. Di samping itu, pengembangan prasarana jalan juga memainkan peran signifikan dalam mendorong kemakmuran yang berkelanjutan dan stabilisasi ekonomi, yang meliputi aspek-aspek seperti keberlanjutan fiskal, perkembangan pasar kredit, serta dampaknya terhadap dinamika pasar tenaga kerja. Fenomena ini sejalan

dengan tiga strategi utama dalam upaya pembangunan ekonomi, yaitu *pro growth*, *pro jobs*, dan *pro poor* (Paulus Iriyena, Dkk, 2019)

Kebijakan pemerintah mengenai infrastruktur jalan diatur dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2022, yang merupakan amandemen kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 mengenai Jalan. Dalam Undang-Undang ini, istilah "jalan" merujuk kepada infrastruktur transportasi darat yang meliputi semua elemen jalan, termasuk struktur penghubung dan pendukungnya, yang direncanakan untuk penggunaan kendaraan di permukaan tanah, di atasnya, di bawahnya, dan/atau di atas air, termasuk permukaan air, dengan pengecualian jalur kereta api, jalan untuk truk, dan jalan kabel. Sistem jaringan jalan dapat diartikan sebagai kumpulan segmen-segmen jalan yang berfungsi untuk menghubungkan dan mengintegrasikan pusat-pusat aktivitas atau pertumbuhan dengan simpul-simpul transportasi, dan memiliki wilayah yang dipengaruhi oleh layanannya dalam sebuah hirarki yang terstruktur (Jovan R. Samual, 2014)

Kabupaten Ponorogo merupakan sebuah entitas administratif yang terletak di bagian barat provinsi Jawa Timur, dibatasi oleh provinsi Jawa Tengah di sebelah baratnya. Terletak sekitar 200 kilometer arah barat daya dari ibu kota provinsi, Surabaya, Ponorogo dikenal dengan sebutan "Kota Reog" sebagai cerminan dari akar sejarah kesenian Reog yang berasal dari daerah ini. Luas keseluruhan wilayah Ponorogo mencapai 1.371,78 km<sup>2</sup>, yang secara administratif dibagi dalam 21 kecamatan, 279 desa, dan 26 kelurahan. Menurut sensus kependudukan di Ponorogo, jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 949.318 mengalami banyak kenaikan dari tahun sebelumnya dengan jumlah laki-laki sebanyak 474.257 dan perempuan 475.061. Dari jumlah penduduk sebanyak itu ada 508.956 jumlah kepemilikan kendaraan, di hitung dari seluruh jumlah kendaraan, termasuk mobil, truk, bus, sepeda motor, dan juga alat berat. Sehingga hampir setengah lebih dari jumlah penduduk di Ponorogo menggunakan fasilitas jalan. (Ika Farida Ulfa, 2016)

Kebijakan pemerintah mengenai jalan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penyelenggaraan jalan serta peraturan lalu lintas. Peraturan daerah ini mencakup berbagai aspek terkait pengelolaan jalan dan peraturan lalu lintas, meliputi pelaksanaan, pengaturan, dan pembinaan jalan, pembangunan serta pengawasan infrastruktur jalan, pengelolaan ruang milik dan manfaat jalan, serta aturan lalu lintas dan angkutan jalan. Di samping itu, peraturan ini juga menetapkan sistem jaringan jalan, upaya untuk kelancaran dan keamanan lalu lintas, serta keselamatan pengguna jalan dan pengemudi (Ika Farida Ulfa, 2016)

Pengelolaan jalan dan pengaturan lalu lintas harus didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu manfaat, keamanan, keselamatan, keselarasan, keseimbangan, keadilan, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kebersamaan dan kemitraan. Oleh karena itu, pengelolaan jalan pada tingkat kabupaten dan desa perlu dirancang untuk memaksimalkan fungsi dari jaringan jalan, guna meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran, serta kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan. (Ika Farida Ulfa, 2016).

Penelitian terdahulu merupakan sebuah kegiatan membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan penulis yang sudah dilakukan dari peneliti sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian penulis sebelumnya sehingga penulis dapat melihat apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang penulis laksanakan.

Penelitian yang dilakukan Ramoth Sitompul Universitas Indonesia yang berjudul “Proses Implementasi Dan Evaluasi Hasil Kebijakan Jalan Desa: Studi Persepsi Masyarakat Di Kota Depok” hasil penelitiannya adalah dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan secara umum dapat dikategorikan baik dari perspektif persepsi masyarakat, yang tercermin dalam tiga aspek utama: transparansi, akuntabilitas publik, dan responsivitas. Meskipun demikian, masih terdapat kebutuhan untuk

meningkatkan aspek akuntabilitas publik. Sementara itu, evaluasi hasil kebijakan dari segi efisiensi, ketepatan waktu, dan efektivitas menunjukkan kinerja yang memadai secara keseluruhan. Lebih lanjut, terdapat hubungan yang signifikan antara aspek responsivitas dalam pelaksanaan kebijakan dengan tiga aspek hasil kebijakan—yaitu efisiensi, ketepatan waktu, dan efektivitas—yang diindikasikan oleh nilai koefisien korelasi Spearman's rho yang signifikan pada level 0,01 (dengan dua bintang).

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan desa di Kota Depok pada tahun anggaran 2005 berhasil dilakukan secara efektif dan memuaskan secara keseluruhan. Namun, aspek akuntabilitas publik perlu menjadi fokus perhatian utama untuk diperbaiki dan ditingkatkan. Terdapat pengaruh yang signifikan antara proses implementasi kebijakan dan hasil kebijakan yang dicapai.

Penelitian yang dilakukan Moch Fitra Repas Alamindah Universitas Brawijaya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Barat Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Wilayah Kapanjen”, hasil penelitian dari penelitian ini adalah Kesimpulan dari studi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur Jalan Lingkar Barat Kabupaten Malang merupakan contoh dari penerapan kebijakan yang efektif. Variabel-variabel yang relevan dengan proses implementasi kebijakan pembangunan Jalan Lingkar Barat memberikan gambaran yang mendalam mengenai dampaknya. Penelitian ini secara khusus menganalisis pengaruh dari pelaksanaan kebijakan tersebut terhadap percepatan proses pembangunan di Kecamatan Kapanjen.

Penelitian yang dilakukan Alike Fathinnah Universitas Islam Sultan Agung yang berjudul Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Belanja Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi. Hasil penelitian ini adalah Kawasan Pasar Atas adalah destinasi wisata

belanja dan ekonomi kreatif dengan mempresentasikan keunikan dan kearifan budaya lokal bukittinggi. Dalam hasil evaluasi implementasi kebijakan ditemukan bahwa tidak terlaksananya proses implementasi kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai “Analisis Implementasi Penyelenggaraan Jalan Satu Arah (*One Way*) di Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Menurut latar belakang tersebut maka ditarik rumusan masalah yaitu, Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Jalan Satu Arah (*one way*) di Kabupaten Ponorogo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Menurut rumusan permasalahan tersebut maka tujuan dari penelitian ini yaitu. Untuk mengevaluasi implementasi kebijakan jalan satu arah (*one way*) di Kabupaten Ponorogo.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini yaitu di antaranya :

### **1. Bagi Instansi**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi penyelenggaraan jalan dan sistem jaringan jalan di Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo.

### **2. Bagi Akademik**

Hasil penelitian ini harapannya bisa dipergunakan dan menyumbangkan manfaat untuk penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan peraturan daerah terutama dalam penerapan kebijakan jalan.

### 3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini harapannya menyumbangkan manfaat dalam konteks teoritis dan aplikatif bagi masyarakat umum, perusahaan swasta serta lembaga pemerintah dalam evaluasi implementasi kebijakan jalan di Kabupaten Ponorogo.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Evaluasi

Mengacu pada KBBI, evaluasi merupakan suatu kegiatan penelitian yang dirancang untuk menilai sejauh mana layanan informasi atau produk dapat memenuhi kebutuhan konsumen atau pengguna. Proses ini melibatkan langkah-langkah pengumpulan dan analisis berbagai jenis bukti guna menilai dampak serta efektivitas dari objek, program, atau proses yang sedang dikaji, dengan merujuk pada kriteria dan persyaratan yang sudah ditentukan oleh pengguna sebelumnya (Nuraini Husdar, 2023)

Miller (2008) Evaluasi adalah sebuah proses penilaian kualitatif yang melibatkan penggunaan data yang diperoleh dari tes serta informasi penilaian lainnya untuk menetapkan nilai.

Menurut Djemari Mardapi (2008), evaluasi adalah suatu proses sistematis yang dilaksanakan dalam meningkatkan mutu, efektivitas, dan produktivitas dari suatu lembaga dalam pelaksanaan sebuah program (Pangemanan, 2022).

### 2. Implementasi

Berdasarkan definisi yang terdapat dalam KBBI, istilah implementasi berarti proses pelaksanaan ataupun penerapan dari suatu rencana. Proses ini dilaksanakan setelah tahap perencanaan dianggap telah mencapai kesempurnaan. Nurdin mengemukakan bahwa implementasi bukan sekadar serangkaian aktivitas, melainkan suatu proses yang terstruktur dengan tujuan tertentu. Dengan demikian, implementasi dapat

dipahami sebagai tindakan strategis yang harus mengikuti desain awal agar tujuan yang diinginkan dapat terwujud secara efektif (Al Afkar,2023)

Menurut karya tulis Prof. H. Tachjan yang berjudul “Implementasi Kebijakan Publik”, implementasi kebijakan publik dipahami sebagai suatu fenomena yang sangat kompleks, melibatkan berbagai dimensi seperti aspek organisasi, kepemimpinan, dan manajerial dari pihak pemerintah yang memegang otoritas. Dalam konteks ini, nilai kepercayaan (trust) dan tanggung jawab (responsibility) dipandang sebagai elemen-elemen fundamental. Kepercayaan berperan sentral dalam membangun penerimaan masyarakat terhadap kebijakan publik, yang pada gilirannya mendorong masyarakat untuk memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut (Aurellia, 2022).

### 3. Kebijakan

Kebijakan merupakan sekumpulan prinsip dan landasan konseptual dengan fungsi menjadi pedoman pada perancangan serta pelaksanaan berbagai tindakan, kepemimpinan, serta strategi operasional. Istilah ini berlaku dalam berbagai konteks, termasuk pemerintahan, keorganisasian, sektor swasta, dan perorangan. Berbeda dari aturan atau hukum yang mempunyai kekuatan paksaan atau pelarangan terhadap suatu perilaku (seperti kewajiban membayar pajak penghasilan), kebijakan berperan sebagai panduan untuk menentukan langkah-langkah yang dianggap paling efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan (Iqbal Hamly,2020).

Menurut Carl Friedrich, kebijakan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas strategis yang diarahkan guna memperoleh visi individu, kelompok, ataupun pemerintah pada konteks kingcup yang ditentukan. Tindakan ini mempertimbangkan berbagai hambatan yang ada sambil berupaya menemukan dan memanfaatkan kesempatan untuk mewujudkan visi ataupun sasaran yang dikehendaki (Menlhk, t.thn.).

#### 4. Jalan

Mengacu pada UU RI Nomor 38 Tahun 2004, definisi jalan mencakup berbagai dimensi dari infrastruktur transportasi, yang meliputi keseluruhan komponen jalan seperti struktur utama dan fasilitas pendukung yang dirancang khusus guna memenuhi kebutuhan lalu lintas. Jalan dapat ditempatkan pada berbagai media, baik itu di permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air. Namun, definisi ini tidak mencakup jalur kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Peran jalan sangat vital dalam mendukung pemerataan pengembangan wilayah, distribusi hasil pembangunan yang merata, serta memperkuat pertahanan dan keamanan nasional, yang merupakan elemen kunci dalam strategi pembangunan nasional (Regina Lombogia, 2024)

Mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dinyatakan bahwa pengelolaan jalan harus dilakukan secara terencana dan menyeluruh, jalan memiliki peran yang sangat penting sebagai komponen dari sistem jaringan jalan yang saling terhubung dan menghubungkan berbagai pusat aktivitas. Dalam konteks ini, sistem jaringan jalan dikategorikan menjadi dua kelompok utama, yaitu jaringan jalan primer dan jaringan jalan sekunder. Kategori ini ditetapkan berdasarkan fungsi, status, serta kelas dari masing-masing segmen jalan. Klasifikasi berdasarkan status tersebut menetapkan kewenangan Pemerintah Pusat untuk mengelola jalan yang memiliki signifikansi dalam kepentingan nasional, sedangkan Pemerintah Daerah memiliki otoritas untuk mengelola jalan dalam wilayahnya masing-masing sesuai dengan prinsip otonomi daerah (Dinas Pekerja Umum Perumahan Dan Pemukiman Kabupaten Kulon Progo, 2023).

#### 5. Satu Arah (*One Way*)

Sistem Satu Arah (SSA) adalah satu metode manajemen lalu lintas yang mengubah beberapa ruas jalan yang saling terhubung menjadi jalan satu arah, sehingga mengelilingi suatu wilayah. Tujuan dari

penerapan SSA adalah untuk mengurangi konflik kendaraan di persimpangan, yang pada akhirnya membuat arus lalu lintas lebih lancar. Pola lalu lintas ini di implementasikan dengan mengubah jalan dua arah menjadi jalan satu arah, bertujuan untuk meningkatkan keselamatan serta kapasitas jalan dan persimpangan, sehingga memperlancar arus lalu lintas. Biasanya, sistem ini diterapkan di area perkotaan. (Budi hartanto susilo, 2018).

Jalan satu arah adalah jalan dimana kendaraan hanya bergerak dalam satu arah (Oglesby,Clarson,1993). Tujuan pengaturan jalan satu arah adalah untuk mengurangi kemacetan dan keterlambatan lalu lintas. Jalan satu arah umumnya meningkatkan kapasitas jaringan jalan dengan mengurangi keterlambatan di ruas jalan dan persimpangan akibat berkurangnya konflik lalu lintas. Jalan satu arah akan efektif jika diterapkan pada sistem jaringan berbentuk grid, karena penerapan sistem ini membutuhkan jalan lain untuk menampung arus lalu lintas berlawanan. Peningkatan arus lalu lintas dan banyaknya titik konflik antara kendaraan dan pejalan kaki mendorong penerapan jalan satu arah.

## **F. Landasan Teori**

### **1. Teori Implementasi Kebijakan**

Pemerintah di seluruh dunia menggunakan berbagai instrumen kebijakan publik untuk menawarkan solusi untuk beragam problematika yang ada di masyarakat. Kebijakan publik tersebut dirancang dengan tujuan utama untuk memastikan dan meningkatkan kesejahteraan warga negara. Hal ini menjelaskan mengapa kebijakan publik sering kali dianggap sebagai sebuah rencana strategis dari pemerintah yang mencakup program dan aktivitasnya. Tidak ada negara yang dapat dianggap berhasil dalam memberikan pelayanan kepada rakyatnya serta memperoleh pengakuan di tingkat internasional tanpa adanya kebijakan yang dirancang secara cermat. Kebijakan

tersebut tidak hanya berfungsi sebagai rencana tindakan pemerintah, tetapi juga sebagai pedoman serta kerangka acuan bagi aktivitas negara dalam upaya pemanfaatan sumber daya secara optimal dan pembenaran atas penggunaan sumber daya tersebut. Indonesia, sebagai suatu entitas negara, juga mengakui pentingnya perumusan dan penerapan kebijakan publik dalam konteks tersebut. Sejak peringatan awal kemerdekaannya, pemerintah Indonesia telah merumuskan kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Bahkan, dapat dikemukakan bahwa negara ini tidak kekurangan dalam merancang kebijakan yang komprehensif, yang kemudian direkam dalam dokumen-dokumen berwarna-warni dengan judul yang menggugah. Sebagai contoh, Indonesia telah menetapkan RAPBN (Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara), dan sebelumnya, dalam era Orde Baru, dikenal dengan GBHN serta REPELITA ( (Kristian, 2023).

Berdasarkan pengertian tersebut, kebijakan dapat dilihat sebagai realisasi praktis dari berbagai program dalam siklus pembentukan kebijakan. Analisis kebijakan mengedepankan kajian terhadap hubungan sebab-akibat, penilaian kinerja, serta efisiensi program-program publik. Dalam konteks sektor publik, kebijakan memegang peran yang sangat vital dalam pengambilan keputusan, menjadikannya sebagai instrumen penting bagi politisi, konsultan, dan para pengambil keputusan pemerintah. Harapan dari pelaksanaan program-program pemerintah adalah tercapainya hasil yang optimal untuk mendukung kemajuan wilayah dalam menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Selain itu, kebijakan dirancang untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat demi pencapaian tujuan-tujuan kolektif yang telah disepakati(Pustaka Lan RI, 2023)

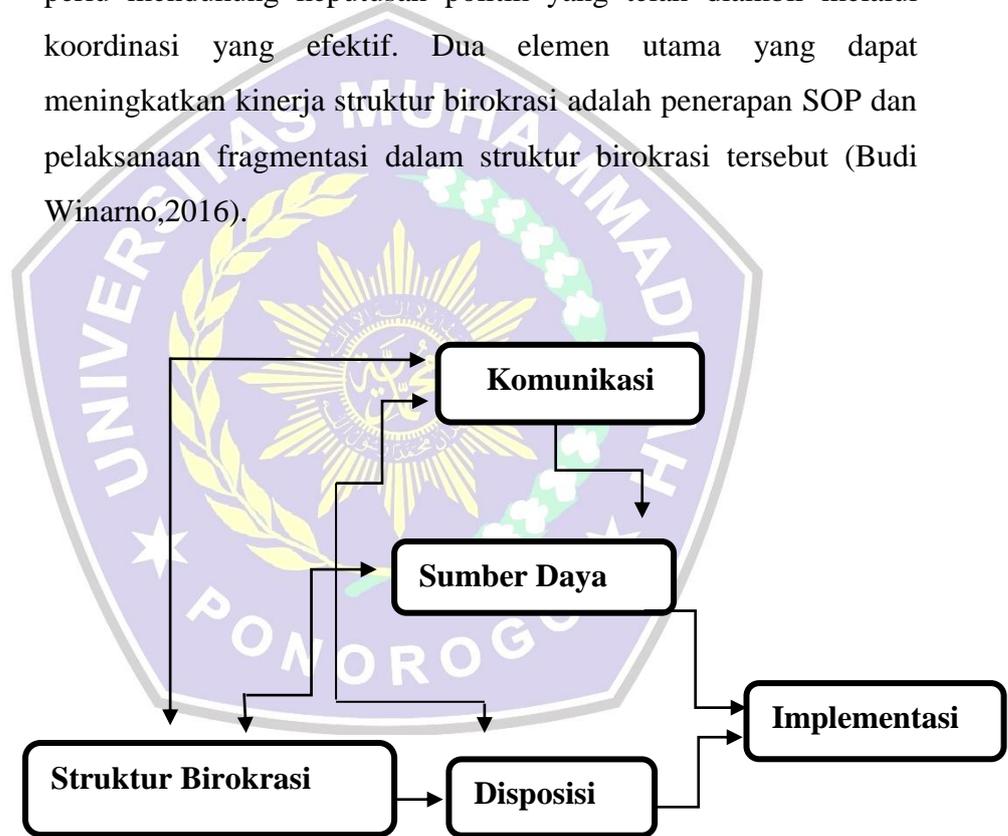
Menurut teori Edward III (Budi Winarno,2016) dalam pelaksanaan kebijakan, terdapat empat variabel utama yang

mempengaruhinya, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Menurut Edward III, komunikasi berperan sebagai elemen krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Edward III mengemukakan bahwasanya kesuksesan pencapaian tujuan pengimplementasian kebijakan publik sangat mendapat pengaruh dari sejauh mana proses komunikasi dilakukan secara efektif. Implementasi kebijakan yang berhasil hanya dapat dicapai apabila para pengambil keputusan memahami dengan jelas apa yang sedang dikerjakan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan kebijakan disalurkan atau dikomunikasikan kepada pihak yang tepat. Efektivitas komunikasi memainkan peran krusial dalam menjamin konsistensi penerapan kebijakan di kalangan masyarakat. Dalam mengevaluasi keberhasilan komunikasi, terdapat tiga dimensi utama yang perlu diperhatikan, yaitu penyampaian pesan, kejelasan informasi, dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan (Budi Winarno,2016).
2. Faktor kedua yang berperan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan adalah sumber daya. Dalam kerangka implementasi kebijakan, sumber daya meliputi sejumlah elemen esensial, antara lain tenaga kerja, informasi, wewenang, serta sarana dan prasarana (Budi Winarno,2016).
3. Disposisi merupakan elemen ketiga yang berperan dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam kerangka ini, sikap para pelaksana kebijakan menjadi komponen kunci ketiga dalam model pelaksanaan kebijakan publik. Untuk mencapai efektivitas implementasi yang diinginkan, pelaksana kebijakan tidak hanya dituntut untuk memahami tugas-tugas mereka secara mendalam, tetapi juga harus memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakannya secara optimal. Faktor-

faktor esensial yang harus diperhatikan dalam variabel disposisi mencakup seleksi birokrat yang tepat serta penyediaan insentif yang memadai (Budi Winarno,2016).

4. Struktur birokrasi memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan publik, meskipun sumber daya dan para pelaksana kebijakan telah memahami tugas mereka serta memiliki motivasi untuk menjalankan kebijakan tersebut. Untuk memastikan keberhasilan implementasi, birokrasi sebagai pelaksana kebijakan perlu mendukung keputusan politik yang telah diambil melalui koordinasi yang efektif. Dua elemen utama yang dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi adalah penerapan SOP dan pelaksanaan fragmentasi dalam struktur birokrasi tersebut (Budi Winarno,2016).



Gambar 1. 1

Model Implementasi Kebijakan Edward III

*Sumber Widodo, 2017:94*

Untuk memastikan kelancaran dalam penerapan kebijakan, perlu dilakukan diseminasi yang efektif dan terencana. Terdapat empat prasyarat utama dalam pengelolaan diseminasi kebijakan, yaitu:

1. Dalam masyarakat, terdapat penghormatan terhadap kekuasaan pemerintah yang memandang pentingnya secara moral untuk mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak yang memiliki wewenang.
2. Kesadaran untuk mengakui, menerima, dan melaksanakan kebijakan terbentuk ketika kebijakan tersebut dianggap memiliki rasionalitas yang kuat.
3. Keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah.
4. Pada tahap awal, sebuah kebijakan dapat memicu berbagai kontroversi, namun seiring dengan berjalannya waktu, kebijakan tersebut dapat diterima dan dianggap sebagai norma yang umum.

#### **G. Definisi Operasional**

Bedasarkan pendekatan yang diuraikan oleh Edward III, ada empat variabel penting yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Yaitu sebagai berikut:

##### **1. Komunikasi**

Komunikasi sangat penting karena melibatkan penyampaian informasi, ide, ketrampilan, dan peraturan kepada pihak yang berhak. Komunikasi harus akurat dan jelas bagi pelaksana, menjadi ukuran sejauh mana kebijakan telah disampaikan dan dapat diimplementasikan secara konsisten.

- a. Dimensi transmisi mengharuskan kebijakan disampaikan tidak hanya kepada pelaksana tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak lain yang berkepentingan.

- b. Dimensi kejelasan memastikan bahwa kebijakan disampaikan secara jelas sehingga semua pihak memahami maksud, tujuan, dan substansi kebijakan, sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk keberhasilan kebijakan tersebut.
- c. Dimensi konsistensi memastikan bahwa kebijakan tidak membingungkan pelaksana, target grup, dan pihak berkepentingan lainnya.

## 2. Sumber Daya

Perintah implementasi mungkin disampaikan dengan baik, namun jika pelaksana kekurangan sumber daya, implementasi tidak akan berjalan dengan lancar. Sumber daya meliputi:

- a. Sumber daya manusia
- b. Sumber daya anggaran
- c. Sumber daya peralatan
- d. Sumber daya kewenangan

## 3. Disposisi

Disposisi adalah sikap pelaksana yang mendukung kebijakan yang diterapkan. Jika pelaksana mendukung kebijakan, implementasi akan berjalan dengan baik. Namun, jika mereka tidak sejalan dengan pembuat keputusan, proses implementasi menjadi lebih sulit. Disposisi meliputi sebagai berikut:

- a. Pengangkatan birokrasi, dimana pelaksana haruslah orang-orang yang berdedikasi pada kebijakan.
- b. Insentif, yang dapat digunakan untuk mempengaruhi tindakan pelaksana dengan menambah keuntungan atau biaya tertentu.

## 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki dua karakteristik yaitu:

- a. Prosedur Kerja Baku Standar (SOP), yang memastikan kepastian waktu, sumber daya, dan kebutuhan penyeragaman dalam organisasi.
- b. Fragmentasi yaitu penyebaran tanggung jawab kebijakan kepada beberapa badan yang memerlukan koordinasi (Edward dalam Agnes, 2022).

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dengan pendekatan kualitatif dapat memahami bagaimana kebijakan jalan satu arah diterapkan di Ponorogo dengan mendalam melalui observasi langsung dan wawancara dengan pegawai Dinas Perhubungan Ponorogo dan masyarakat setempat. Melakukan wawancara semi- terstruktur dengan pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pengguna jalan untuk mengumpulkan data mengenai pelaksana, tantangan, dan dampak kebijakan. Menganalisis implementasi kebijakan dengan memperhatikan empat variabel utama menurut teori Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dengan pendekatan kualitatif penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas dan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan jalan satu arah di Kabupaten Ponorogo.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini direncanakan dan dilaksanakan di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo untuk mengumpulkan data terkait perencanaan dan pelaksanaan kebijakan jalan satu arah. Selain itu, penelitian juga mencakup pengamatan langsung pada ruas jalan utama yang menerapkan kebijakan ini, seperti Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Jendral Sudirman, dan Jalan Urip Sumoharjo. Lokasi ini dipilih karena Kabupaten Ponorogo menghadapi pro dan kontra dari masyarakat terhadap penerapan kebijakan jalan satu arah,

termasuk dalam aspek pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Fenomena ini memerlukan kajian mendalam untuk mengembangkan strategi penerapan yang efektif dan mengatasi tantangan yang ada.

### **3. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih subjek yang dianggap memiliki pengetahuan dan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan ini, seperti pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo yang bertanggung jawab atas perencanaan dan implementasi kebijakan. Selain itu, pengguna jalan utama seperti pengendara bermotor dan masyarakat juga menjadi subjek penelitian.

Teknik snowball sampling digunakan untuk mendapatkan subjek tambahan melalui rekomendasi dari subjek awal yang sudah diwawancarai. Metode ini membantu memperluas jaringan informasi dan mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif tentang kebijakan ini. Observasi langsung akan dilakukan di beberapa ruas jalan utama menerapkan kebijakan satu arah, seperti Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Jendral Sudirman, dan Jalan Urip Sumoharjo. Dengan menggabungkan kedua teknik ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang efektivitas implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap arus lalu lintas serta aktivitas masyarakat di Kabupaten Ponorogo.

Pemilihan informan pada penelitian ini, diperoleh dengan melakukan wawancara yang dilakukan terhadap 5 informan, diantaranya yaitu rekomendasi Bapak Imron Rosyidi, ST.,M.Si (kepala sub bagaian umum dan kepegawaian) kepada Bapak Mehendro Akso,S.P.,M.M.A (kepala bidang pengendalian operasional lalu lintas dan jalan) berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas

pengelolaan sumber daya manusia serta operasional lalu lintas. Selanjutnya Bapak Mahendro Akso meneruskan rekomendasi ini ke masyarakat untuk mendorong partisipasi aktif mereka dalam meningkatkan keselamatan dan pemeliharaan jalan. Faris Masduqi, Alvi Yunita, dan Nurjanah sebagai perwakilan masyarakat, diharapkan dapat menjadi perubahan yang membantu mensosialisasikan dan mengimplementasikan inisiatif-inisiatif tersebut.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam studi ini, peneliti akan melaksanakan pengumpulan data yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan penelitian. Teknik yang akan diterapkan oleh penulis antara lain:

##### **a. Observasi**

Observasi dilakukan dengan metode pengumpulan data melalui penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek yang relevan dengan kegiatan studi, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai keadaan objek penelitian tersebut.

##### **b. Wawancara**

Wawancara akan dilakukan terhadap pegawai Dinas Perhubungan serta yang bertanggung jawab dalam pengelolaan jalan, serta wawancara kepada beberapa pengguna jalan. Dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan tersebut maka peneliti akan melaksanakan penelusuran data lebih lanjut di Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dan penelusuran di internet terkait data penunjang lainnya.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode yang diterapkan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam bentuk dokumen, tulisan, angka, serta gambar yang dapat memberikan dukungan dalam proses penelitian. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi dilakukan melalui pengambilan foto yang bertujuan untuk memperkuat hasil penelitian dalam bentuk visual. Dokumentasi dapat berupa gambar ataupun tulisan. Metode dokumentasi sebagai salah satu teknik dalam pengumpulan data adalah strategi yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengakses informasi dari berbagai sumber.

## 5. Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong,2007:320). Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar- benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang di peroleh. Uji keabsahan data dalam penelitian meliputi uji creadibility, transferability, dependability, dan confirmability (Sugiyono,2007:270). Agar data dalam penelitian dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan secara:

### 1. Triangulasi

(Wiliam Wiersma,1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kreadibilitas atau uji kepercayaan, diartikan sebagai pengeekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tringulasi sumber, sumber, triangulasi teknik

pengumpulan data, dan waktu (Sugiono,2007:273). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Misalnya dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data mana yang dianggap benar (Sugiono,2007:274).

## 2. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto- foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya (Sugiyono,2007:275).

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis terapkan dalam studi ini yaitu analisis deskriptif. Data di ambil dari wawancara yang akan di lakukan dengan pihak Dinas Perhubungan dan Masyarakat khususnya pengguna Jalan di Kabupaten Ponorogo. Selain itu untuk data yang bersifat dokumen akan di ambil dari penelitian yang dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dan data Internet. Setelah data dikumpulkan, penulis akan melakukan proses klasifikasi data berdasarkan kebutuhan analisis. Proses selanjutnya adalah analisis kualitatif yang hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk uraian komprehensif, yang memungkinkan untuk diambil kesimpulan dari analisis tersebut.